



## Analisis Framing dan Etika Penyiaran terhadap Representasi Pesantren dalam Tayangan Xpose Uncensored Trans7

Nisrina Nabibah Sunarto<sup>1\*</sup>, Laili Zulfa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang, Indonesia

\*Penulis korespondensi: [nisrinanabibahs02@gmail.com](mailto:nisrinanabibahs02@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This study examines the construction of reality and violations of broadcasting ethics in the Xpose Uncensored Trans7 program in 2025 which displays a negative image of pesantren and kiai. Using a descriptive qualitative approach with the framing analysis of Pan and Kosicki's model, this study reveals the existence of tendentious narrative and visual manipulation, thus giving the impression of harassment of religious symbols. The broadcasts are considered to violate the principles of balance and social responsibility as stipulated in the Broadcasting Code of Conduct and Broadcast Program Standards (P3SPS). The public reaction that emerged through the hashtag #BoikotTRANS7 reflects the increasing public awareness of the importance of ethics in broadcasting practices. This phenomenon shows that the media not only functions as a conveyor of information, but also has a moral responsibility in shaping public opinion in a fair and balanced manner. This study emphasizes the urgency of increasing media literacy and ethical sensitivity in the production of broadcast content, especially those related to the representation of religious groups. Thus, the results of this study are expected to be a reference for broadcasting institutions, media regulators, and the public in encouraging more ethical and responsible broadcasting practices in the digital era.*

**Keywords:** *Broadcasting Ethics; Framing Tendensius; Media Literacy; Religious Symbols; Responsibility*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji konstruksi realitas dan pelanggaran etika penyiaran dalam program Xpose Uncensored Trans7 tahun 2025 yang menampilkan citra negatif terhadap pesantren dan kiai. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis framing model Pan dan Kosicki, studi ini mengungkap adanya manipulasi narasi dan visual yang bersifat tendensius, sehingga menimbulkan kesan pelecehan terhadap simbol-simbol keagamaan. Tayangan tersebut dinilai melanggar prinsip keberimbangan dan tanggung jawab sosial sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Reaksi publik yang muncul melalui tagar #BoikotTRANS7 mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya etika dalam praktik penyiaran. Fenomena ini menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam membentuk opini publik secara adil dan berimbang. Penelitian ini menegaskan urgensi peningkatan literasi media dan sensitivitas etika dalam produksi konten siaran, khususnya yang menyangkut representasi kelompok keagamaan. Dengan demikian, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga penyiaran, regulator media, dan masyarakat dalam mendorong praktik penyiaran yang lebih etis dan bertanggung jawab di era digital.

**Kata kunci:** Etika Penyiaran; Framing Tendensius; Literasi Media; Simbol Keagamaan; Tanggung Jawab

### 1. LATAR BELAKANG

Media massa memiliki peran sentral dalam membentuk persepsi publik terhadap realitas sosial, termasuk terhadap lembaga keagamaan seperti pesantren. Dalam masyarakat Indonesia yang religius, cara media merepresentasikan pesantren tidak hanya memengaruhi citra institusi keagamaan, tetapi juga persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai Islam tradisional. Televisi, sebagai medium dengan jangkauan luas dan tingkat kepercayaan tinggi, memiliki potensi besar menggiring opini publik ketika penyajiannya tidak proporsional atau melanggar prinsip etika penyiaran (McQuail, 2010). Kasus tayangan *Xpose Uncensored* di Trans7 yang menampilkan Pondok Pesantren Lirboyo dengan narasi provokatif menjadi contoh nyata bagaimana media televisi dapat menimbulkan kontroversi dan krisis representasi.

Program *Xpose Uncensored* yang tayang pada 13 Oktober 2025 menampilkan narasi “Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan pondok?” yang dinilai melecehkan tradisi pesantren dan kiai. Tayangan tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat, terutama komunitas santri dan Nahdlatul Ulama. Tagar #BoikotTRANS7 merebak di media sosial, memperlihatkan benturan antara konstruksi media dan nilai sosial masyarakat. Seperti diungkapkan Hall (1997), representasi media tidak pernah netral karena selalu dibentuk oleh ideologi dan kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, framing yang dilakukan *Xpose Uncensored* cenderung membentuk citra negatif terhadap pesantren.

Observasi awal menunjukkan adanya kecenderungan media televisi menggunakan pendekatan sensasional daripada edukatif dalam merepresentasikan pesantren. Hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menegaskan bahwa media harus berfungsi sebagai sarana informasi, pendidikan, dan kontrol sosial. Beberapa penelitian menegaskan bahwa pelanggaran etika penyiaran kerap muncul akibat lemahnya kontrol redaksional terhadap konten televisi (Kusuma & Nugroho, 2019). Kasus *Xpose Uncensored* menjadi penting dikaji karena memperlihatkan bagaimana nilai etika penyiaran dijalankan secara tidak konsisten di stasiun televisi nasional.

Secara teoretis, penelitian mengenai framing pesantren dalam media Indonesia masih jarang dilakukan. Sebagian besar studi lebih banyak membahas pemberitaan pesantren di media daring dan surat kabar. Rahmawati (2021) dan Nurhadi (2022) menemukan bahwa pesantren kerap direpresentasikan dalam konteks konflik, kemiskinan, atau isu ekstremisme. Sementara itu, studi yang secara eksplisit menyoroti framing pesantren dalam media televisi dan keterkaitannya dengan prinsip etika penyiaran masih minim. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menggabungkan analisis framing media dan evaluasi etika penyiaran dalam satu studi kasus aktual.

Televisi memiliki karakteristik berbeda dari media cetak atau daring karena menggabungkan elemen visual, audio, dan narasi yang membentuk persepsi lebih cepat dan emosional (Lull, 2000). Ketika unsur naratif dan visual digunakan untuk menegaskan stereotip tertentu, dampaknya menjadi lebih kuat terhadap publik. Oleh sebab itu, analisis kritis terhadap struktur visual dan verbal dalam tayangan *Xpose Uncensored* menjadi penting untuk menyingkap bagaimana pesantren dikonstruksi dalam ruang wacana media modern.

Dari perspektif sosial, pesantren adalah institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang berkontribusi besar terhadap pembentukan moral bangsa (Dhofier, 2011). Nilai-nilai seperti tawadhu, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap guru merupakan ciri khas pesantren yang dijaga turun-temurun. Ketika nilai-nilai tersebut direduksi atau dijadikan bahan

olok-olok dalam media, maka terjadi distorsi terhadap identitas budaya dan spiritual bangsa. Ini menunjukkan pentingnya penelitian komunikasi yang berupaya memahami relasi antara media dan lembaga keagamaan secara lebih etis dan reflektif.

Dalam konteks industri media, persaingan ketat di era digital sering kali menempatkan nilai sensasional di atas tanggung jawab sosial. Tekanan untuk memperoleh rating tinggi membuat redaksi cenderung mengedepankan kontroversi ketimbang akurasi (Couldry & Hepp, 2017). Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana logika ekonomi media dapat memengaruhi kualitas penyiaran dan mengaburkan prinsip jurnalisme etik. Kasus *Xpose Uncensored* memperlihatkan bahwa pelanggaran framing bukan hanya kelalaian individu, tetapi juga hasil dari tekanan struktural industri media.

Berdasarkan pengamatan terhadap pemberitaan dan respons publik, terlihat kesenjangan antara idealisme media sebagai lembaga edukatif dan praktik penyiaran yang cenderung sensasional. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana media memahami batas antara kritik sosial dan pelecehan terhadap simbol keagamaan. Pertanyaan tersebut menjadi dasar penelitian untuk menilai sejauh mana stasiun televisi mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi tiga hal: pertama, bagaimana framing pesantren direpresentasikan dalam tayangan *Xpose Uncensored* Trans7 tahun 2025; kedua, sejauh mana tayangan tersebut mematuhi prinsip etika penyiaran menurut P3SPS; dan ketiga, apa implikasi framing tersebut terhadap persepsi publik tentang pesantren. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pola framing media terhadap pesantren, menilai kepatuhan etika penyiaran, serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan tanggung jawab sosial media televisi di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya pada bidang kajian media dan etika penyiaran. Selain itu, secara praktis penelitian ini dapat menjadi refleksi bagi pelaku industri penyiaran agar lebih berhati-hati dalam merepresentasikan simbol keagamaan di ruang publik. Dalam konteks yang lebih luas, hasil penelitian ini akan memperkaya wacana tentang peran media dalam menjaga harmoni sosial serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan keagamaan di Indonesia.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Teori framing merupakan salah satu pendekatan penting dalam studi komunikasi massa untuk memahami bagaimana media membentuk realitas sosial melalui proses seleksi,

penonjolan, dan penyusunan makna. Entman (1993) menjelaskan bahwa framing berfungsi untuk menyoroti aspek tertentu dari realitas dan menempatkannya dalam konteks yang menimbulkan interpretasi spesifik. Dalam konteks penyiaran televisi, framing tidak hanya hadir dalam teks verbal, tetapi juga dalam visual, intonasi suara, dan struktur naratif yang memengaruhi persepsi audiens. Pan dan Kosicki (1993) menambahkan bahwa framing bekerja melalui empat struktur utama, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik, yang secara bersama-sama menyusun logika pemberitaan. Melalui kerangka ini, peneliti dapat mengkaji bagaimana tayangan *Xpose Uncensored* melakukan seleksi fakta dan membentuk konstruksi makna terhadap pesantren sebagai objek pemberitaan.

Framing media tidak berdiri secara netral karena selalu dipengaruhi oleh ideologi, nilai ekonomi, dan kepentingan institusional media. Menurut Eriyanto (2012), framing merupakan cara media memilih realitas tertentu dan menonjolkannya agar publik melihat peristiwa dari sudut pandang yang dikehendaki. Dengan demikian, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memproduksi makna melalui bahasa, simbol, dan narasi. Dalam konteks penelitian ini, teori framing digunakan untuk menelaah bagaimana *Xpose Uncensored* memosisikan pesantren dalam citra tertentu, apakah sebagai simbol ketertinggalan, hierarki kekuasaan, atau bentuk tradisionalisme yang disalahpahami. Pendekatan ini membantu menyingkap bagaimana dimensi visual dan naratif bekerja secara ideologis dalam membentuk opini publik.

Selain teori framing, penelitian ini juga berlandaskan pada teori etika penyiaran yang menekankan tanggung jawab moral media terhadap masyarakat. McQuail (2010) menyatakan bahwa etika penyiaran merupakan instrumen normatif yang menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial media. Etika penyiaran menuntut media untuk menghormati nilai agama, budaya, serta martabat manusia. Di Indonesia, prinsip ini dilembagakan melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI, 2012). Dokumen tersebut mengatur agar setiap program siaran tidak mengandung pelecehan terhadap simbol keagamaan atau stereotip negatif terhadap kelompok sosial tertentu.

Pelanggaran etika penyiaran muncul ketika media gagal mempertimbangkan dampak sosial dari pesan yang disampaikan kepada publik. Menurut Ward (2011), tanggung jawab etis jurnalisme mencakup akurasi informasi, keadilan representasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks *Xpose Uncensored*, penerapan etika penyiaran menjadi krusial karena tayangan tersebut tidak hanya menampilkan fakta, tetapi juga menilai kehidupan pesantren melalui sudut pandang yang provokatif. Analisis terhadap konten ini memungkinkan peneliti mengukur sejauh mana Trans7 menjalankan tanggung jawab sosial dan mematuhi

norma etika penyiaran sebagaimana diatur dalam P3SPS. Kedua teori ini saling melengkapi: framing memberikan alat analisis terhadap konstruksi makna media, sedangkan etika penyiaran menyediakan standar normatif untuk menilai sejauh mana konstruksi tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral publik.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal yang berfokus pada analisis isi teks dan visual tayangan *Xpose Uncensored* Trans7 (13 Oktober 2025) serta dokumen pendukung terkait etika penyiaran. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami makna di balik konstruksi pesan media dalam konteks sosial tertentu (Creswell, 2016), sedangkan desain studi kasus memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena tunggal yang kompleks (Yin, 2018). Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder yang dapat diakses secara sah dan terbuka, meliputi rekaman tayangan, transkrip observasi peneliti, pernyataan resmi Trans7, dokumen Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta pemberitaan dari media kredibel seperti Antara News, NU Online, dan MUI Online. Pemilihan data dilakukan berdasarkan prinsip relevansi, kredibilitas, dan keabsahan sumber (Sugiyono, 2019).

Analisis data dilakukan dengan menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu analisis framing dan analisis etika penyiaran. Analisis framing menggunakan model Pan dan Kosicki (1993) untuk menelusuri empat struktur analitik—sintaksis, skrip, tematik, dan retorik—yang menjelaskan bagaimana media menyusun realitas dan menonjolkan makna tertentu. Sementara itu, analisis etika penyiaran dilakukan dengan memetakan temuan penelitian terhadap pasal-pasal dalam *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)* KPI (KPI, 2023). Proses analisis mencakup transkripsi segmen tayangan, pengkodean tematik, verifikasi silang dengan dokumen resmi, dan interpretasi hasil dalam konteks tanggung jawab sosial media sebagaimana dijelaskan McQuail (2010).

Untuk menjaga validitas dan etika penelitian, dilakukan triangulasi sumber dan dokumen guna memastikan keakuratan interpretasi (Moleong, 2017). Validitas data diperkuat melalui perbandingan lintas-sumber antara tayangan, pernyataan lembaga resmi, dan respons publik. Peneliti juga membatasi penggunaan materi visual hanya pada bagian yang relevan untuk menghindari pelanggaran hak cipta dan menjaga integritas penelitian. Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada ketergantungan terhadap data sekunder yang dapat membatasi kedalaman kontekstual, namun transparansi dalam penyajian dan analisis tetap dijaga sesuai prinsip keilmuan (Neuman, 2014).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Konstruksi Realitas Pesantren dalam Tayangan Xpose Uncensored**

Tayangan *Xpose Uncensored* edisi 13 Oktober 2025 menampilkan pesantren bukan sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang berperan membentuk moral bangsa, melainkan sebagai ruang yang sarat simbol ketundukan dan kemewahan di kalangan kiai. Narasi provokatif seperti “santrinya minum susu aja kudu jongkok” dan “yang ngesot itulah yang ngasih amplop” menunjukkan adanya upaya media membingkai pesantren sebagai institusi feodal dan irasional. Konstruksi seperti ini sejalan dengan pandangan Berger dan Luckmann (1966) bahwa media tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi membentuknya melalui proses seleksi dan penonjolan makna tertentu.

Melalui gaya tutur yang sinis dan visualisasi yang menyoroti kemewahan figur kiai, *Xpose Uncensored* membangun representasi sosial yang menyudutkan pesantren sebagai simbol ketimpangan relasi sosial. McQuail (2010) menegaskan bahwa media memiliki kekuatan hegemonik dalam mendefinisikan apa yang dianggap penting dan bagaimana publik harus memahaminya. Dalam konteks ini, Trans7 tampak gagal menjaga objektivitas penyajian dan terjebak dalam framing bias yang mengabaikan konteks budaya dan religius kehidupan pesantren.

Struktur visual dan audio tayangan turut memperkuat konstruksi yang menyesatkan. Gambar santri menunduk dan berjalan jongkok disandingkan dengan narasi yang mempertanyakan moralitas kiai, menghasilkan relasi makna yang menimbulkan mitos baru sebagaimana dijelaskan Barthes (1972). Realitas sosial pesantren yang berakar pada nilai adab dan penghormatan guru diubah menjadi citra feodalistik. Bagi penonton yang tidak mengenal dunia pesantren, tayangan ini berpotensi menciptakan persepsi tunggal yang keliru dan reduktif.

Gaya bahasa satir dan sarkastik menunjukkan adanya strategi framing untuk menggiring persepsi negatif publik. Pan dan Kosicki (1993) menjelaskan bahwa framing dilakukan melalui empat struktur: sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Dalam *Xpose Uncensored*, struktur sintaksis ditandai dengan pemilihan judul sensasional, sementara skrip disusun untuk memperkuat narasi kritik. Pada struktur tematik dan retorik, diksi dan intonasi diarahkan untuk menimbulkan kesan bahwa kiai adalah pelaku dominasi, sedangkan santri menjadi korban sistem religius yang tertutup.

Dari sisi etika penyiaran, tayangan tersebut melanggar prinsip keberimbangan dan penghormatan terhadap nilai agama sebagaimana diatur dalam *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran* (KPI, 2023). Narasi yang tidak memberi ruang klarifikasi

menciptakan bias representasional yang menyalahi asas keadilan dalam komunikasi massa (Daymon & Holloway, 2011). Alih-alih mendidik publik, tayangan tersebut memperluas stereotip dan stigma sosial terhadap lembaga keagamaan.

Konstruksi realitas pesantren dalam *Xpose Uncensored* menunjukkan pergeseran orientasi media dari fungsi edukatif menuju logika komodifikasi. Mosco (2009) menjelaskan bahwa tekanan ekonomi dan persaingan rating mendorong media menciptakan sensasi untuk menarik audiens. Dalam kerangka itu, representasi pesantren tidak lahir dari observasi objektif, melainkan dari kalkulasi ideologis dan ekonomi yang mengorbankan etika serta tanggung jawab sosial. Media seharusnya berfungsi sebagai agen literasi publik, bukan sebagai instrumen pembentuk stigma terhadap lembaga keagamaan yang memiliki kontribusi besar bagi moral bangsa.

### **Analisis Framing: Struktur Sintaksis dan Skrip dalam Penyusunan Narasi**

Analisis framing terhadap tayangan *Xpose Uncensored* Trans7 menunjukkan bahwa konstruksi narasi dibangun dengan struktur sintaksis yang menonjolkan ketegangan dan sensasi sejak awal segmen. Judul “Santrinya Minum Susu Aja Kudu Jongkok, Emang Gini Kehidupan Pondok?” berfungsi sebagai headline yang secara eksplisit membentuk frame evaluatif dan provokatif. Dalam pandangan Pan dan Kosicki (1993), headline adalah pintu masuk utama yang membimbing penonton memahami arah wacana. Pemilihan diksi “kudu jongkok” menandai penggunaan bahasa populer yang dimaksudkan untuk menciptakan kejutan emosional sekaligus mempertegas kesan subordinatif terhadap kehidupan santri. Secara sintaksis, kalimat ini mengandung nilai ideologis karena mengarahkan persepsi bahwa perilaku santri merupakan bentuk ketundukan irasional, bukan ekspresi adab atau penghormatan yang khas dalam kultur pesantren.

Struktur sintaksis juga tampak dari urutan informasi yang disusun untuk menciptakan oposisi antara kiai dan santri. Narator menggambarkan kiai sebagai figur yang hidup dalam kemewahan dan santri sebagai kelompok yang tunduk tanpa daya. Dalam teori framing, ini disebut sebagai pembingkai oposisi biner yang berfungsi memperjelas siapa yang berperan sebagai “aktor dominan” dan siapa yang menjadi “objek tertindas”. Pola ini tidak muncul secara kebetulan, melainkan sebagai strategi naratif untuk memancing emosi penonton melalui dikotomi moral antara yang berkuasa dan yang dikorbankan. Van Dijk (1998) menjelaskan bahwa struktur berita sering kali menyimpan ideologi tersembunyi dalam penyusunan aktor, peristiwa, dan akibatnya. Dalam kasus ini, Trans7 membentuk struktur yang memperkuat stigma sosial bahwa otoritas keagamaan di pesantren bersifat feodal dan eksploitatif.

Dari sisi skrip, urutan adegan memperlihatkan kecenderungan dramatik yang mengabaikan prinsip verifikasi dan keberimbangan. Cuplikan yang menunjukkan santri sedang berbaris, menunduk, dan mencium tangan kiai muncul tanpa konteks ritual keagamaan yang sebenarnya menjadi bagian dari tradisi penghormatan. Alur penyajian informasi disusun secara linear untuk menegaskan kesan bahwa kehidupan pesantren dipenuhi simbol ketundukan dan kemewahan. Dalam kerangka Pan dan Kosicki (1993), struktur skrip berfungsi sebagai panduan kronologis yang membantu audiens memahami makna peristiwa. Ketika urutan peristiwa disusun dengan tujuan membentuk emosi tertentu, maka framing sudah mulai bekerja pada tingkat kognitif penonton. Hal ini memperlihatkan bahwa narasi media tidak hanya menjelaskan realitas, tetapi juga mengarahkan pemaknaan terhadap realitas tersebut.

Penyusunan skrip yang menonjolkan perbedaan kelas antara kiai dan santri mencerminkan praktik simbolik yang disengaja. Narator tidak sekadar menggambarkan, melainkan mengarahkan penonton pada kesimpulan moral tertentu, misalnya bahwa kiai adalah pihak yang diuntungkan dari ketundukan santri. Dalam konteks ini, framing beroperasi melalui strategi naratif yang menggeser fokus dari nilai-nilai keilmuan dan spiritualitas pesantren menjadi isu sosial tentang ketimpangan dan kemewahan. Fairclough (1995) menjelaskan bahwa praktik wacana media seperti ini memperlihatkan relasi kekuasaan dalam teks yang berupaya membentuk kesadaran sosial. Maka dari itu, tayangan *Xpose Uncensored* tidak bisa dibaca sekadar sebagai produk jurnalistik, melainkan sebagai teks ideologis yang menyisipkan pandangan tertentu tentang dunia pesantren.

Dalam struktur tematik, penekanan dilakukan pada aspek moralitas dan ekonomi yang saling dipertentangkan. Narasi “yang ngesot itulah yang ngasih amplop” berfungsi sebagai klimaks dari keseluruhan frame. Kalimat ini tidak hanya menyindir, tetapi juga membalik nilai penghormatan menjadi tindakan transaksional. Dalam teori framing, ini disebut penonjolan frame moral, yaitu ketika media membentuk persepsi tentang benar dan salah melalui pilihan kata yang memancing penilaian etis. Struktur ini sangat kuat karena bekerja pada tingkat afektif penonton. McQuail (2010) menegaskan bahwa efek framing moral seperti ini dapat menimbulkan polarisasi sosial karena penonton akan merasa terdorong untuk menilai tanpa memahami konteks budaya yang melatarinya.

Selain itu, gaya tutur narator yang bersifat informal dan sarkastik memperkuat fungsi retorik dalam struktur framing. Pan dan Kosicki (1993) menjelaskan bahwa retorika dalam framing berfungsi untuk menegaskan makna dan mengukuhkan posisi ideologis pembuat pesan. Gaya ini sengaja digunakan untuk menciptakan kedekatan emosional dengan audiens, namun di sisi lain justru mengaburkan batas antara fakta dan opini. Ketika bahasa digunakan

sebagai alat persuasi, maka nilai objektivitas berita tereduksi menjadi bentuk hiburan yang bernuansa sensasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa framing media tidak hanya bekerja melalui konten, tetapi juga melalui gaya penyajian yang membentuk persepsi publik.

Analisis sintaksis dan skrip juga mengungkap absennya prinsip *cover both sides* dalam narasi tayangan. Tidak ada ruang bagi representasi alternatif dari pihak pesantren atau santri yang dapat menyeimbangkan persepsi publik. Hal ini menyalahi prinsip dasar dalam jurnalisme etis yang menuntut keberimbangan, keakuratan, dan konteks. Kovach dan Rosenstiel (2014) menegaskan bahwa jurnalisme yang etis harus mengutamakan kebenaran faktual dan tanggung jawab sosial. Dengan meniadakan suara dari pihak yang diberitakan, *Xpose Uncensored* tidak hanya membingkai pesantren secara sepihak, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan opini publik yang bias terhadap lembaga keagamaan.

Bila ditinjau secara keseluruhan, framing dalam tayangan *Xpose Uncensored* memperlihatkan bahwa Trans7 beroperasi dalam logika media komersial yang mengutamakan efek dramatis di atas akurasi. Struktur sintaksis yang provokatif dan skrip yang disusun secara manipulatif menjadi bukti bahwa narasi dibentuk bukan untuk memberi pemahaman, melainkan untuk menciptakan efek emosional. Goffman (1974) menjelaskan bahwa frame adalah mekanisme yang mengatur cara individu memahami realitas. Dalam konteks ini, frame media bekerja sebagai alat pembentuk persepsi kolektif yang menentukan bagaimana publik menilai pesantren, bukan berdasarkan realitas empirik, tetapi berdasarkan konstruksi simbolik yang dibentuk oleh media.

Dengan demikian, analisis framing terhadap tayangan *Xpose Uncensored* menunjukkan bahwa media memiliki kekuatan besar dalam membentuk kesadaran sosial dan opini publik. Struktur sintaksis dan skrip yang digunakan secara sistematis membangun narasi pesantren sebagai lembaga tertutup, irasional, dan penuh ketimpangan. Padahal kenyataan di lapangan jauh lebih kompleks dan tidak dapat direduksi menjadi potret sederhana yang disusun untuk kepentingan dramatik. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa media massa harus diawasi dalam menjalankan fungsi informatifnya agar tidak menjadi alat produksi stigma terhadap lembaga keagamaan yang seharusnya dihormati.

### **Analisis Tematik dan Retoris: Penguatan Citra Negatif melalui Gaya Bahasa dan Visualisasi**

Tayangan *Xpose Uncensored* membentuk citra negatif pesantren bukan hanya melalui struktur naratif, tetapi juga melalui tema dan gaya penyajian yang digunakan. Tema utama yang muncul dalam segmen kontroversial ini adalah kontras antara kesalehan simbolik dan kemewahan material. Narasi “santrinya minum susu aja kudu jongkok” dan “yang ngesot itulah

yang ngasih amplop” menempatkan pesantren sebagai ruang yang dipenuhi kontradiksi moral. Tema ini memunculkan kesan bahwa kehidupan religius di pesantren tidak sejalan dengan nilai kesederhanaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Dalam pandangan Entman (1993), tema seperti ini merupakan hasil dari seleksi realitas yang menonjolkan aspek tertentu sambil meniadakan konteks sosial yang lebih luas.

Gaya bahasa yang digunakan dalam tayangan tersebut memperkuat pembentukan tema yang cenderung menyudutkan. Narator menggunakan gaya tutur informal dengan intonasi sarkastik yang menyerupai gaya konten hiburan, bukan laporan jurnalistik. Pilihan diksi yang provokatif seperti “emang gini kehidupan pondok?” berfungsi sebagai perangkat retorik untuk menggiring penonton agar menilai pesantren secara negatif. Tuchman (1978) menjelaskan bahwa bahasa media memiliki fungsi simbolik dalam menciptakan makna sosial yang melampaui fakta. Ketika bahasa digunakan untuk mengejek atau memperolok, pesan moral yang ingin disampaikan berubah menjadi bentuk penilaian sosial yang bias. Tayangan ini tidak lagi berfungsi sebagai medium informatif, melainkan menjadi arena pembentukan stigma.

Dari sisi visualisasi, framing diperkuat melalui pemilihan gambar yang bersifat sugestif. Cuplikan yang menampilkan santri sedang berjalan jongkok, menunduk, dan mencium tangan kiai diulang dalam tempo lambat sehingga menimbulkan kesan dramatik. Gambar kiai yang mengenakan pakaian serba putih dengan latar ruangan megah ditampilkan bersamaan dengan narasi tentang kekayaan dan ketimpangan. Barthes (1972) dalam teori semiotikanya menjelaskan bahwa hubungan antara teks dan gambar menciptakan makna konotatif yang bisa lebih kuat dari makna denotatifnya. Dalam konteks ini, visual bukan hanya memperlihatkan adegan, tetapi juga menyampaikan ide tersembunyi tentang kemunafikan moral dan kekuasaan religius. Ketika teks dan visual disusun secara harmonis untuk mendukung satu makna, maka terbentuklah mitos baru yang menyesatkan.

Elemen retorik dalam tayangan ini juga bekerja melalui penggunaan intonasi, efek suara, dan pemilihan sudut pandang kamera. Nada narasi yang berintonasi sinis serta efek suara latar yang bernuansa misterius memperkuat kesan negatif. Sudut pandang kamera yang menyorot santri dari posisi tinggi menciptakan relasi visual yang menunjukkan dominasi. Dalam studi retorika media, cara pandang seperti ini disebut *symbolic power of image* karena berfungsi menanamkan pesan hierarkis tanpa harus diucapkan secara verbal (Hall, 1997). Visualisasi seperti itu memperkuat stereotip tentang ketundukan santri dan superioritas kiai yang dipersepsikan sebagai figur elitis. Akibatnya, citra pesantren direduksi menjadi simbol ketimpangan sosial.

Analisis tematik juga menunjukkan adanya pola pengulangan makna yang bersifat hegemonik. Narasi tentang kehidupan santri yang miskin dan tunduk diulang untuk memperkuat persepsi bahwa pesantren adalah institusi yang tidak modern. Tidak ada usaha dalam tayangan untuk menunjukkan peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menanamkan nilai keilmuan dan kebangsaan. Van Dijk (2006) menegaskan bahwa pengulangan tema dalam teks media berfungsi memperkuat ideologi dominan dan melemahkan posisi sosial kelompok yang direpresentasikan. Dalam kasus ini, ideologi modernitas media berhadapan dengan tradisi pesantren yang dipersepsikan kuno dan tidak rasional. Maka pesantren tidak hanya dikonstruksi secara negatif, tetapi juga dimarginalkan secara simbolik.

Gaya bahasa yang digunakan narator dalam tayangan tersebut memiliki kekuatan retorik yang berlapis. Di satu sisi, gaya sarkastik menciptakan efek hiburan yang menarik bagi penonton. Namun di sisi lain, gaya ini membentuk persepsi bahwa apa yang disampaikan adalah fakta yang tidak perlu diverifikasi. McQuail (2010) menyebut fenomena ini sebagai *entertainment framing*, yaitu kondisi ketika media menggunakan strategi naratif hiburan untuk menyampaikan isu serius sehingga mengaburkan batas antara fakta dan opini. Akibatnya, penonton tidak lagi bersikap kritis terhadap isi pesan, tetapi menikmati narasi sebagai kebenaran yang sudah jadi. Dalam konteks etika penyiaran, gaya seperti ini melanggar prinsip kejelasan informasi dan keadilan representasi.

Selain bahasa dan visual, kekuatan retorik tayangan ini juga terletak pada pemilihan narator sebagai suara dominan. Narator berperan sebagai agen interpretatif yang mengarahkan penonton dalam memahami realitas pesantren. Tidak ada ruang bagi suara alternatif dari pihak pesantren untuk menyeimbangkan narasi. Dalam kerangka analisis wacana, hal ini disebut *discursive exclusion*, yaitu penghapusan suara yang tidak mendukung agenda media (Fairclough, 1995). Ketika media hanya menghadirkan satu sudut pandang, maka yang terbentuk bukan lagi diskursus publik, melainkan monolog ideologis yang berpotensi menciptakan kesalahpahaman sosial.

Pada akhirnya, pola tematik dan retorik dalam tayangan *Xpose Uncensored* memperlihatkan bahwa citra negatif pesantren dibentuk secara sistematis melalui strategi kebahasaan dan visual yang saling mendukung. Tema yang diangkat, gaya bahasa yang digunakan, serta visualisasi yang ditampilkan membentuk kesatuan pesan yang mengarah pada stigmatisasi lembaga pesantren. Tayangan semacam ini menunjukkan kegagalan media dalam menjalankan fungsi edukatif dan tanggung jawab sosialnya. Sebagaimana ditegaskan oleh McNair (2017), media seharusnya menjadi ruang bagi pemahaman lintas budaya, bukan alat reproduksi prasangka. Analisis ini memperlihatkan bahwa ketika retorika digunakan untuk

menggiring opini, maka yang lahir bukanlah kebenaran publik, melainkan persepsi yang dimanipulasi untuk tujuan sensasional.

### **Evaluasi Etika Penyiaran: Pelanggaran Prinsip P3SPS dan Tanggung Jawab Sosial Media**

Etika penyiaran merupakan fondasi moral yang memastikan media berfungsi sebagai sarana edukatif dan informatif, bukan sekadar alat hiburan atau sensasi. Dalam konteks tayangan *Xpose Uncensored* di Trans7, pelanggaran etika penyiaran dapat dilihat dari ketidakseimbangan informasi serta cara media menampilkan realitas pesantren dengan sudut pandang yang cenderung provokatif. Berdasarkan regulasi penyiaran di Indonesia, terutama yang diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam dokumen-standar penyiaran, setiap program siaran wajib menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kebudayaan bangsa (Sidiq, 2023). Namun, tayangan ini menonjolkan sisi-sisi kontroversial yang merendahkan martabat lembaga keagamaan dengan menggunakan gaya narasi yang bersifat sarkastik dan visual yang menimbulkan persepsi negatif. Pelanggaran ini bukan hanya menyangkut norma etik tetapi juga prinsip tanggung jawab sosial media terhadap publik (von Krogh, 2012).

Regulasi siaran di Indonesia secara eksplisit menegaskan bahwa isi siaran tidak boleh merendahkan kelompok masyarakat tertentu atau menampilkan informasi yang tidak berimbang (Law No. 32/2002 on Broadcasting; KPI profile document, 2012). Dalam tayangan *Xpose Uncensored*, narasi dan gambar disusun tanpa memberikan ruang klarifikasi kepada pihak pesantren. Ketidakhadiran suara dari pihak yang diberitakan menjadikan tayangan ini melanggar prinsip keberimbangan sebagaimana diatur oleh kebijakan penyiaran. McQuail (2010) menegaskan bahwa prinsip fairness dan balance merupakan syarat utama bagi media publik agar dapat menjaga legitimasi moralnya di mata masyarakat. Dengan mengabaikan prinsip tersebut, Trans7 bukan hanya kehilangan posisi sebagai lembaga penyiaran yang netral tetapi juga berpotensi memperkuat bias sosial terhadap pesantren.

Secara etis, tayangan tersebut juga mengabaikan prinsip non-discrimination yang diatur dalam kerangka penghormatan terhadap nilai-nilai keberagaman dalam komunikasi massa (Bardoel & d'Haenens, 2004). Gaya bertutur yang mengandung nada olok-olok terhadap praktik keagamaan di pesantren dapat dikategorikan sebagai bentuk pelecehan simbolik. Hall (1997) menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan representasional yang mampu membentuk persepsi kolektif tentang suatu kelompok. Ketika pesantren ditampilkan sebagai ruang kemunafikan dan kiai digambarkan sebagai sosok yang berlebihan dalam kekuasaan, maka media secara tidak langsung memperkuat stereotip negatif terhadap komunitas Islam tradisional.

Dalam perspektif tanggung jawab sosial media, tayangan seperti *Xpose Uncensored* menunjukkan gejala komersialisasi berita. McQuail (2010) mengemukakan bahwa media modern seringkali mengorbankan akurasi dan keadilan demi daya tarik pasar. Ketika realitas sosial dijadikan komoditas hiburan, maka fungsi edukatif media tergeser oleh orientasi rating dan sensasi. Sidiq (2023) menyebut bahwa dalam era digital dan persaingan penyiaran, regulator seperti KPI menghadapi tantangan mempertahankan isi program yang edukatif dan bernilai budaya. Tayangan Trans7 memperlihatkan praktik tersebut dengan memanfaatkan kontroversi sebagai daya jual.

Selain melanggar norma etik, tayangan ini juga bertentangan dengan prinsip tanggung jawab sosial sebagaimana ditegaskan dalam literatur model *media responsibility and accountability* (von Krogh, 2012). Teori tersebut menekankan bahwa media wajib melayani kepentingan publik dengan menyajikan informasi yang jujur, akurat, dan menghormati keberagaman. Dalam kasus Trans7, pendekatan penyajian yang tidak berimbang dan mengandung unsur pelecehan justru menimbulkan keresahan publik serta memperuncing perdebatan sosial. Tanggung jawab sosial media menuntut adanya kepekaan terhadap dampak tayangan bukan sekadar memenuhi selera pasar.

Evaluasi terhadap tayangan *Xpose Uncensored* menunjukkan bahwa pelanggaran etika penyiaran tidak hanya terjadi pada level teknis penyajian tetapi juga pada level ideologis dan institusional. Ketika media gagal membedakan antara kritik sosial dan eksploitasi simbol keagamaan maka batas etis penyiaran telah dilampaui. Berdasarkan teori *media accountability* (von Krogh, 2012) dan literatur komunikasi etis (McQuail, 2010), tanggung jawab moral media seharusnya diukur bukan hanya dari dampak tayangan tetapi juga dari niat penyiaran itu sendiri. Dengan demikian kasus Trans7 dapat dijadikan refleksi penting bagi industri penyiaran di Indonesia untuk meninjau kembali standar etikanya dan memperkuat fungsi pengawasan internal agar regulasi penyiaran menjadi pedoman moral dalam praktik jurnalistik televisi.

### **Dampak Sosial dan Reaksi Publik terhadap Representasi Pesantren**

Tayangan *Xpose Uncensored* Trans7 menimbulkan dampak sosial yang cukup besar, terutama di kalangan pesantren dan komunitas santri. Banyak pihak menilai bahwa representasi pesantren yang ditampilkan menyinggung nilai religius dan moral yang dijunjung tinggi masyarakat Islam tradisional. Dalam kerangka teori representasi media yang dijelaskan oleh Hall (1997), media tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga membentuknya melalui konstruksi simbolik dan naratif. Tayangan ini memperlihatkan bagaimana media dapat mengubah citra lembaga keagamaan menjadi bahan hiburan yang kontroversial. Akibatnya,

kepercayaan masyarakat terhadap media arus utama menurun dan muncul desakan agar lembaga pengawas seperti KPI memperketat pengawasan terhadap isi siaran televisi nasional.

Dampak digital dari tayangan tersebut tampak melalui munculnya tagar #BoikotTRANS7 di berbagai platform media sosial. Castells (2009) menjelaskan bahwa media digital membentuk ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat mengekspresikan protes secara kolektif. Dalam kasus ini, media sosial berfungsi sebagai arena perlawanan simbolik terhadap televisi yang dianggap tidak sensitif terhadap nilai keagamaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat kini berperan sebagai khalayak aktif yang mampu mengkritisi isi media serta membangun opini alternatif. Reaksi publik ini juga menandakan perubahan orientasi konsumsi media, di mana audiens tidak lagi pasif tetapi menjadi subjek moral yang menilai kepatutan isi siaran.

Dampak sosial juga tampak dari keresahan yang muncul di lingkungan pesantren dan organisasi keagamaan. Sejumlah tokoh dari PBNU dan GP Ansor menyatakan keberatan serta mempertimbangkan langkah hukum terhadap Trans7. Dalam konteks komunikasi publik, hal ini mencerminkan bentuk *public accountability* yaitu mekanisme sosial untuk menuntut tanggung jawab media atas efek sosial tayangannya. McQuail (2010) menegaskan bahwa tanggung jawab publik adalah pilar utama bagi legitimasi media dalam masyarakat demokratis. Ketika media tidak peka terhadap nilai sosial, maka kritik publik berfungsi sebagai alat kontrol moral terhadap praktik penyiaran yang menyimpang dari etika profesi.

Konflik wacana juga muncul akibat perbedaan tafsir antara pihak yang menganggap tayangan itu sebagai kritik sosial dengan mereka yang melihatnya sebagai pelecehan terhadap simbol agama. Polarisasi ini menunjukkan benturan antara rasionalitas media modern dengan nilai kultural masyarakat pesantren. Habermas (2006) menyebut kondisi ini sebagai bentuk distorsi komunikasi di ruang publik, di mana media sering mengabaikan konteks budaya demi kepentingan sensasional. Ketika ruang publik tidak lagi menjadi arena dialog rasional, maka yang terjadi adalah pertentangan simbolik yang memperdalam jurang pemahaman antar kelompok sosial.

Secara sosiologis, tayangan tersebut memperkuat stereotip negatif terhadap pesantren, terutama di kalangan masyarakat yang kurang memahami kehidupan santri. Penggambaran yang bias dapat mengubah persepsi publik terhadap lembaga pendidikan Islam sebagai institusi yang kolot dan tertutup. Berger dan Luckmann (1966) menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi simbolik yang berulang, sehingga representasi negatif yang diulang dalam media dapat memengaruhi struktur pemaknaan publik. Dalam jangka panjang, hal ini

berpotensi melemahkan otoritas moral kiai dan mengikis kepercayaan terhadap lembaga keagamaan tradisional.

Meskipun Trans7 telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, dampak reputasional terhadap lembaga penyiaran tersebut masih terasa di masyarakat. Permintaan maaf dapat meredakan kemarahan publik, namun tidak otomatis memulihkan kepercayaan yang hilang. Coombs (2007) melalui *Situational Crisis Communication Theory* menjelaskan bahwa pemulihan reputasi menuntut transparansi, empati, dan langkah korektif yang nyata. Dalam konteks ini, tanggung jawab Trans7 seharusnya tidak berhenti pada permintaan maaf, melainkan diwujudkan dalam bentuk revisi kebijakan redaksional dan peningkatan literasi etika penyiaran bagi tim produksi. Kasus ini menjadi pembelajaran penting bahwa dalam era keterbukaan informasi, setiap representasi lembaga keagamaan menuntut kepekaan moral yang tinggi agar media tetap dipercaya sebagai pilar demokrasi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus tayangan *Xpose Uncensored* Trans7 memperlihatkan bagaimana media memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi publik terhadap lembaga sosial dan keagamaan. Representasi pesantren yang bias dan cenderung negatif menunjukkan kegagalan media dalam menjalankan fungsi edukatif serta tanggung jawab sosialnya. Framing yang tidak berimbang, penggunaan narasi provokatif, dan visualisasi yang merendahkan tokoh agama membuktikan lemahnya kesadaran etika penyiaran di tingkat produksi. Dampaknya tidak hanya pada reputasi media, tetapi juga terhadap kepercayaan publik dan citra pesantren sebagai lembaga moral bangsa.

Secara normatif, tayangan tersebut melanggar sejumlah prinsip dalam *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)*, terutama dalam aspek keberimbangan, penghormatan terhadap nilai keagamaan, dan tanggung jawab sosial. Reaksi keras dari publik, organisasi keagamaan, serta munculnya tagar #BoikotTRANS7 menjadi bukti bahwa masyarakat kini semakin kritis terhadap isi siaran yang dinilai menyinggung nilai-nilai moral dan kultural. Fenomena ini menandai pergeseran peran khalayak dari penerima pasif menjadi pengawas aktif terhadap praktik media. Kasus ini menegaskan pentingnya evaluasi internal lembaga penyiaran agar kebebasan berekspresi tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab etik.

Sebagai pembelajaran, media perlu memperkuat mekanisme pengawasan redaksional dan memastikan setiap konten yang menyinggung isu keagamaan disusun dengan sensitivitas dan ketelitian tinggi. KPI diharapkan lebih aktif melakukan pembinaan etik dan penegakan

regulasi agar prinsip P3SPS benar-benar diterapkan dalam praktik, bukan sekadar formalitas. Selain itu, peningkatan literasi media di masyarakat menjadi hal penting agar publik mampu menilai secara kritis tayangan yang berpotensi menyesatkan. Dengan demikian, media dapat kembali berfungsi sebagai ruang publik yang sehat, mendidik, dan menghormati nilai kemanusiaan dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Bardoel, J. L. H., & d'Haenens, L. (2004). Media responsibility and accountability: New conceptualizations and practices. *Communications*, 29(1), 5–25.
- Barthes, R. (1972). *Mythologies*. New York: Hill and Wang.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. New York: Anchor Books.
- Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford: Oxford University Press.
- Coombs, W. T. (2007). *Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The mediated construction of reality*. Cambridge: Polity Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Edisi ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daymon, C., & Holloway, I. (2011). *Qualitative research methods in public relations and marketing communications* (2nd ed.). London: Routledge.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Eriyanto. (2012). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, N. (1995). *Media discourse*. London: Edward Arnold.
- Goffman, E. (1974). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Habermas, J. (2006). Political communication in media society: Does democracy still enjoy an epistemic dimension? *Communication Theory*, 16(4), 411–426.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. London: Sage Publications.
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2012). *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia.
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2023). *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2014). *The elements of journalism: What newspeople should know and the public should expect* (3rd ed.). New York: Three Rivers Press.
- KPI. (2012). *Profil Komisi Penyiaran Indonesia (English profile)*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia.

- KPI. (2023). *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia.
- Kusuma, A., & Nugroho, Y. (2019). Media ethics and accountability in Indonesian television journalism. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 8(2), 112–127.
- Law No. 32/2002 on Broadcasting. (2002). *Republic of Indonesia*.
- Lull, J. (2000). *Media, communication, culture: A global approach* (2nd ed.). Cambridge: Polity Press.
- McNair, B. (2017). *An introduction to political communication* (6th ed.). London: Routledge.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). London: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mosco, V. (2009). *The political economy of communication* (2nd ed.). London: Sage Publications.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Nurhadi, Z. (2022). Framing pesantren dalam media daring Indonesia: Analisis representasi dan ideologi. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 26(1), 45–61.
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication*, 10(1), 55–75. <https://doi.org/10.1080/10584609.1993.9962963>
- Rahmawati, S. (2021). Representasi pesantren dalam pemberitaan media nasional: Analisis framing pada media daring. *Jurnal Aspikom*, 6(1), 15–27.
- Sidiq, F. (2023). The role and challenges of Indonesian Broadcasting Commission (KPI) in facing the digitalization era of broadcasting media in Indonesia. *International Journal of Linguistics, Communication and Broadcasting*, 1(4), 15–19.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tuchman, G. (1978). *Making news: A study in the construction of reality*. New York: Free Press.
- Van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A multidisciplinary approach*. London: Sage Publications.
- Van Dijk, T. A. (2006). Discourse and manipulation. *Discourse & Society*, 17(3), 359–383.
- von Krogh, T. (2012). Understanding media accountability. *International Journal of Media & Cultural Politics*, 8(2), 179–195.
- Ward, S. J. A. (2011). *Ethics and the media: An introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.